

ANALISIS PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN APBN UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH

Oleh:

Elsa Rani Shadewi¹

Kayla Ratu Natia²

M. Zidan Dairoby Ricardo³

Heni Noviarita⁴

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Alamat: Jalan Letnan Kolonel H Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota
Bandar Lampung, Lampung (35131).

Korespondensi Penulis: elsaranishadewi@gmail.com

***Abstract.** This article analyzes the government's role in managing the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) to support national development and increase regional economic independence. In the reform era, the APBN has become an important tool in realizing an inclusive and results-focused development vision. However, the implementation of the APBN also faces various challenges related to efficiency, effectiveness, transparency and accountability in managing state finances. The regional autonomy implemented in Indonesia currently is the result of decentralization, in line with Law no. 32 of 2004 concerning Regional Government and Law no. 33 of 2004 concerning Financial Balance between the Central and Regional Governments. The aim of regional autonomy is to create independence, giving regions freedom in regulation without intervention from the central government. Even though regional autonomy has been implemented in all districts/cities in Indonesia, the role of the central government remains very important. The limitations faced by regions, both in districts and cities, in terms of financing are caused by various factors, including lack of human resources, capital, and demographic differences, all of which influence variations in the rate of*

ANALISIS PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN APBN UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH

economic growth. Therefore, the government's role in managing the APBN is vital to increasing regional economic independence. With the right policies, strengthening regional authority, fair allocation of funds, and empowering human resources and local strategic sectors, it is hoped that each region can achieve better fiscal independence. In this way, sustainable and inclusive economic development can be realized throughout Indonesia.

Keywords: APBN, Role of Government, Development, Regional Economy.

Abstrak. Artikel ini menganalisis peran pemerintah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kemandirian ekonomi daerah. Di era reformasi, APBN telah menjadi alat penting dalam mewujudkan visi pembangunan yang inklusif dan berfokus pada hasil. Namun, pelaksanaan APBN juga menghadapi berbagai tantangan terkait efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia saat ini merupakan hasil dari desentralisasi, sejalan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Tujuan dari otonomi daerah adalah untuk menciptakan kemandirian, memberi daerah kebebasan dalam pengaturan tanpa intervensi dari pemerintah pusat. Meskipun otonomi daerah sudah diterapkan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, peran pemerintah pusat tetap sangat penting. Keterbatasan yang dihadapi daerah, baik di kabupaten maupun kota, dalam hal pembiayaan disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya sumber daya manusia, modal, dan perbedaan demografis, yang semuanya mempengaruhi variasi dalam laju pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam pengelolaan APBN sangat vital untuk meningkatkan kemandirian ekonomi daerah. Dengan kebijakan yang tepat, penguatan kewenangan daerah, alokasi dana yang adil, serta pemberdayaan sumber daya manusia dan sektor strategis lokal, diharapkan setiap daerah dapat mencapai kemandirian fiskal yang lebih baik. Dengan demikian, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dapat terwujud di seluruh wilayah Indonesia.

Kata Kunci: APBN, Peran Pemerintah, Pembangunan, Ekonomi Daerah.

LATAR BELAKANG

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah Indonesia dan memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Dokumen ini menyajikan daftar yang sistematis dan terperinci mengenai rencana penerimaan serta pengeluaran negara yang berlaku selama satu tahun anggaran, dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Menurut M. Suparmoko, APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, merupakan sebuah dokumen yang memuat rincian mengenai perkiraan penerimaan dan pengeluaran negara dalam periode tertentu, yang umumnya mencakup satu tahun. Peran pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat krusial, karena APBN merupakan instrumen utama pada pengelolaan keuangan negara. Berikut adalah beberapa peran pemerintah dalam APBN:

1. **Perencanaan:** Pemerintah bertanggung jawab untuk merencanakan anggaran berdasarkan prioritas pembangunan, kebutuhan masyarakat, dan potensi pendapatan.
2. **Penyusunan:** Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan dan instansi terkait, menyusun Rancangan APBN yang mencakup proyeksi pendapatan, belanja, dan defisit anggaran.
3. **Pengesahan:** Rancangan APBN yang telah disusun disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas dan disetujui. Pengesahan ini merupakan langkah penting untuk memastikan anggaran dapat dijalankan.
4. **Pelaksanaan:** Setelah disetujui, pemerintah melaksanakan APBN dengan mengelola dan menggunakan dana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, termasuk program-program sosial, infrastruktur, dan lainnya.
5. **Pengawasan dan Evaluasi:** Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran agar sesuai dengan tujuan dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, evaluasi juga dilakukan untuk menilai dampak dan hasil dari penggunaan anggaran.
6. **Pelaporan:** Pemerintah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN untuk disampaikan kepada DPR dan publik, sehingga transparansi dan akuntabilitas anggaran dapat terjaga.

ANALISIS PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN APBN UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH

Melalui peran-peran ini, pemerintah berupaya Untuk meraih tujuan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengelola keuangan negara dengan baik. Peran pemerintah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat krusial untuk meningkatkan kemandirian ekonomi daerah. Kemandirian ini menjadi salah satu indikator penting dalam otonomi daerah, di mana setiap daerah diharapkan mampu mengelola sumber daya keuangannya secara mandiri tanpa ketergantungan yang berlebihan pada bantuan dari pemerintah pusat. Dalam konteks ini, pengelolaan APBN yang efektif dapat Memberikan kontribusi positif pada pengembangan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitasnya. kapasitas daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan. Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung penguatan kemandirian fiskal daerah. Salah satu langkah signifikan adalah melalui penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). UU ini bertujuan untuk memperkuat kewenangan daerah dalam perencanaan ekonomi serta memastikan alokasi dana yang adil dan proporsional, sehingga daerah dengan potensi ekonomi rendah mendapatkan dukungan yang memadai untuk menutup kesenjangan. Selain itu, pemberdayaan dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah juga menjadi fokus utama. Dengan Memberikan kebebasan kepada daerah agar menetapkan harga pajak yang sesuai dengan kondisi lokal, pemerintah pusat mendorong daerah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli mereka. Ini diharapkan Tidak hanya meningkatkan kemandirian fiskal, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi daerah. Melalui intervensi yang terencana dan berkelanjutan, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap daerah memiliki kapasitas untuk menggali sumber-sumber pendapatan sendiri. Hal ini penting agar daerah tidak hanya bergantung pada transfer dana dari pusat, tetapi juga mampu membiayai kebutuhan masyarakat secara mandiri. Dengan demikian, pengelolaan APBN yang baik akan berkontribusi pada peningkatan kemandirian ekonomi daerah, menciptakan pertumbuhan yang inklusif, serta mendorong pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, kami menerapkan metode kualitatif, yang merupakan pendekatan penelitian yang menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dan perilaku manusia. Dalam metode ini, data yang dikumpulkan biasanya bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif ini berfokus pada penggambaran fenomena yang terjadi dalam pengelolaan APBN oleh pemerintah serta dampaknya terhadap pembangunan daerah. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi berbagai aspek yang mempengaruhi pengelolaan anggaran dan kemandirian ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah salah satu alat vital dalam pengelolaan keuangan negara dan pembangunan ekonomi di Indonesia. APBN tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur keuangan negara, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kemandirian ekonomi daerah. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa alokasi dan penggunaan anggaran dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di setiap daerah.

Tujuan pengelolaan APBN adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memajukan kehidupan rakyat, hal ini telah diatur dalam UUD 1945, khususnya pada pasal 23 yang berbunyi: “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagai bentuk pengelolaan keuangan negara, ditetapkan setiap tahun melalui undang-undang dan dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan serta tanggung jawab. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Dalam hal ini, dana negara harus mampu mendukung program-program pembangunan yang secara nyata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini mencakup pembangunan fasilitas umum serta upaya untuk memperbaiki taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat miskin. Bantuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi menjadi bagian penting dari program tersebut. Selama ini, sumber penerimaan terbesar negara berasal dari pajak (Noviarita et al., 2022).¹

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memainkan peran yang sangat krusial dalam meningkatkan kemandirian ekonomi daerah. Dalam

ANALISIS PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN APBN UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH

konteks otonomi daerah, Pemerintah pusat tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendukung daerah dalam mengelola keuangannya secara efektif. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai peran pemerintah dalam pengelolaan APBN untuk meningkatkan kemandirian ekonomi daerah.

1. Landasan Hukum dan Kebijakan

Pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mendukung pengelolaan APBN, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). UU ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah dengan memperkuat kewenangan daerah dalam perencanaan ekonomi dan pengelolaan keuangan. Dimana kebijakan fiskal ini merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah Untuk mengarahkan ekonomi suatu negara, diperlukan pengelolaan yang efektif terhadap pengeluaran dan pendapatan negara, dengan tujuan memengaruhi tingkat permintaan agregat dalam perekonomian. Penting untuk dicatat bahwa kebijakan fiskal secara tradisional dipahami sebagai instrumen pemerintah dalam ekonomi yang beroperasi dengan mekanisme pasar bebas, dengan harapan dapat memengaruhi dinamika aktivitas ekonomi di negara tersebut.²

2. Alokasi Dana yang Adil

Salah satu peran utama pemerintah pusat adalah memastikan alokasi dana yang adil dan proporsional kepada daerah. Hal ini bertujuan untuk menutup kesenjangan antara daerah maju dan daerah tertinggal, sehingga setiap daerah dapat mengembangkan potensi lokalnya tanpa ketergantungan berlebihan pada dana pusat. Dengan demikian, alokasi dana yang tepat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang kurang berkembang. Pemerintah perlu melaksanakan evaluasi dan audit secara rutin terhadap penggunaan dana untuk memastikan bahwa alokasi tersebut berjalan dengan efektif dan efisien. Proses audit ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi kemungkinan penyimpangan atau praktik korupsi dalam pengelolaan dana. Alokasi dana harus mempertimbangkan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah, yang berarti daerah

² Epi Purwanti, F. I. (2020). APBN, Kebijakan Fiskal Dan Utang Luar Negeri . p. 2.

dengan tingkat kemiskinan tinggi atau infrastruktur yang kurang berkembang harus menerima alokasi yang lebih besar.³

Sebagai ilustrasi, Alokasi Dana Desa (ADD) diatur untuk dibagi secara proporsional, di mana 60% dari dana dibagi merata dan 40% dibagi berdasarkan kriteria seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, pengelolaan dana harus dilakukan secara transparan agar masyarakat dapat memantau penggunaan dana tersebut. Ini mencakup penyampaian laporan keuangan yang jelas dan terbuka kepada publik. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengawasan dan memberikan masukan untuk perbaikan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam alokasi dana, diharapkan kemandirian ekonomi daerah dapat meningkat secara signifikan. Hal ini tidak hanya akan memperkuat perekonomian lokal tetapi juga berkontribusi pada pembangunan nasional yang lebih merata dan berkelanjutan.⁴

3. Pemberdayaan Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting, terutama dalam pelaksanaan pembangunan. Melalui pajak, negara memperoleh dana yang diperlukan untuk membiayai berbagai pengeluaran, termasuk yang terkait dengan pembangunan. Besaran pajak yang dipungut akan sangat memengaruhi kapasitas anggaran dalam mendanai pengeluaran negara. Bagi pemerintah daerah, pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan yang krusial. Pajak ini berfungsi untuk mendanai beragam pengeluaran, baik yang rutin maupun yang berkaitan dengan pembangunan. Sebagai salah satu sumber keuangan negara, pemerintah berupaya mengoptimalkan pengumpulan dana guna memperkuat kas negara. Lebih dari itu, pajak juga memainkan peranan penting sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi (fungsi regulasi), serta membantu mencapai berbagai tujuan yang melampaui sektor keuangan. (Resmi, 2017).

³ Maulida, & Afrizal. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*.

⁴ Dr. Aan Jaelani, M. (2012). Pengelolaan APBN Dan Politik Anggaran Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam. 1.

ANALISIS PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN APBN UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah melalui peraturan yang ditetapkan. Sumber-Sumber pendapatan asli daerah mencakup pajak daerah, hasil retribusi, keuntungan dari perusahaan milik daerah, serta pengelolaan kekayaan yang telah dipisahkan, serta sumber-sumber pendapatan sah lainnya. Pemerintah pusat memberikan fleksibilitas Kepada daerah, diharapkan untuk mengatur pajak dan retribusi sesuai dengan kondisi lokal yang ada. Ini memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD), sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat. Dengan adanya pemberdayaan ini, diharapkan setiap daerah mampu menciptakan sumber pendapatan yang mandiri dan berkelanjutan.

4. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pemerintah dan masyarakat Indonesia berkomitmen untuk secara konsisten meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aspek penting dalam konteks Pembangunan jangka panjang untuk meningkatkan kemandirian ekonomi daerah. Namun, jika individu yang terlibat aktif dalam proses pembangunan tidak memiliki kualitas yang baik, maka tujuan pembangunan tidak akan tercapai. Sumber daya manusia mencakup semua Kemampuan atau potensi penduduk di suatu wilayah tertentu mencakup berbagai aspek, termasuk karakteristik demografis, sosial dan ekonomi yang ada di dalamnya yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan pembangunan. Dalam konteks pembangunan ekonomi, SDM merujuk pada kemampuan individu untuk bekerja dalam periode tertentu guna menghasilkan barang atau jasa sebagai faktor produksi. Kualitas sumber daya manusia sangat penting karena memiliki pengaruh besar terhadap pengelolaan pembangunan di suatu daerah. Kualitas ini mencakup kemampuan fisik dan nonfisik (seperti kecerdasan dan mental), yang berkontribusi pada percepatan pembangunan di berbagai bidang. Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan melalui investasi di sektor pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja. Keahlian ini akan mendorong produktivitas tenaga kerja, sehingga perusahaan cenderung memberikan upah yang lebih tinggi kepada pekerja yang berkualitas. Pada akhirnya,

individu dengan produktivitas tinggi akan menikmati kesejahteraan yang lebih baik, yang tercermin dalam peningkatan pendapatan dan konsumsi mereka.⁵

Intervensi pemerintah juga mencakup pengembangan kapasitas sumber daya manusia Di tingkat daerah, pemerintah pusat melaksanakan pelatihan dan pendampingan untuk memperkuat kapasitas local, Berupaya untuk meningkatkan kemampuan aparatur daerah dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program serta dalam mengelola keuangan. Hal ini penting agar pengelolaan APBN di tingkat daerah dapat dilakukan secara profesional dan akuntabel.

5. Dukungan untuk Sektor Strategis Lokal

Pemerintah pusat memberikan dukungan finansial serta insentif kepada daerah dalam upaya mengembangkan sektor-sektor strategis yang ada di wilayah tersebut. Dukungan ini ditujukan terutama untuk sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi, seperti pariwisata, pertanian, dan industri kreatif. Dengan dukungan ini, diharapkan terjadi diversifikasi ekonomi yang dapat memperkuat kemandirian ekonomi daerah.

6. Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan

Pengawasan terhadap penggunaan APBN di tingkat daerah juga menjadi fokus pemerintah pusat. Melalui mekanisme audit dan evaluasi, pemerintah dapat memastikan bahwa dana digunakan secara efektif dan akuntabel. Transparansi dalam pengelolaan keuangan akan mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan serta meningkatkan kemandirian ekonomi daerah.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga negara yang memainkan peran krusial dalam pengawasan internal keuangan dan pembangunan, serta menjamin akuntabilitas pemerintah di Indonesia. Organisasi ini telah mengalami pembaruan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2014, yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 31 Desember 2014. Peran BPKP dalam pengawasan semakin ditekankan oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2014, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan

⁵ Putri Rahayu Setiani, S. A. (2023). INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) SEBAGAI INDIKATOR PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH.

ANALISIS PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN APBN UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH

memperkuat fungsi pengawasan demi kesejahteraan rakyat serta kemandirian ekonomi daerah. Untuk mendukung perannya, BPKP melaksanakan serangkaian kegiatan, termasuk Melakukan audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea, dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sejumlah instansi pemerintah, badan hukum, dan wajib pajak, termasuk juga Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tak hanya itu, BPKP juga terlibat dalam Pemanfaatan aset negara dan daerah, serta pelaksanaan program strategis di sektor kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi fokus utama. Selain itu, kegiatan lainnya mencakup pembiayaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Di samping itu, penerapan sistem pengendalian internal dan pengendalian kecurangan juga dilakukan untuk mencegah, mendeteksi, dan menangkal praktik korupsi. Lebih lanjut, BPKP melakukan audit investigatif dan audit terhadap penghitungan keuangan negara, serta memberikan keterangan ahli. Dengan demikian, BPKP memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan penerimaan negara dan daerah, serta efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, sehingga mendukung pencapaian kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama negara melalui fungsi pengawasannya.⁶

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia merupakan alat utama bagi pemerintah dalam mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kemandirian ekonomi di tingkat daerah. APBN berfungsi lebih dari sekadar alat keuangan; ia juga berperan sebagai kebijakan untuk memastikan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh Indonesia. Dengan adanya regulasi yang jelas, Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah. memberikan kerangka

⁶ Yolinda Aprillia, & Usman, F. (2023). Pengaruh Peran Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Atas Pengawasan Kualitas Pengendalian Intern Terhadap Tata Pengelolaan Pemerintah Daerah. 411.

hukum yang mendukung otonomi daerah dan memperkuat kapasitas fiskal daerah. Kebijakan ini mendorong pemerintah daerah untuk aktif dalam mengelola sumber daya ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat. Melalui kebijakan fiskal yang tepat, pemerintah pusat memotivasi daerah untuk mengoptimalkan potensi lokal dalam menciptakan sumber pendapatan yang mandiri. Dalam praktiknya, pemerintah pusat memiliki peran penting dalam memastikan alokasi anggaran yang adil dan merata. Ini bertujuan untuk menutup kesenjangan antara daerah maju dan tertinggal serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang sedang berkembang, dengan mempertimbangkan kebutuhan lokal seperti tingkat kemiskinan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Transparansi dan pengawasan dalam pengalokasian dana sangat penting agar masyarakat dapat memantau dan memberikan masukan, memastikan dana digunakan untuk program yang meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengelola pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli. Pemberdayaan ini memungkinkan daerah menggali potensi pendapatan yang lebih besar dan mengurangi ketergantungan pada dana pusat, sehingga memperkuat kemandirian ekonomi daerah.

Pengelolaan APBN juga mencakup pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk memperkuat ekonomi daerah. Tenaga kerja yang terampil dapat meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya menyediakan anggaran tetapi juga meningkatkan kapasitas aparat daerah agar mampu merencanakan dan mengelola anggaran secara efektif. Selain aspek ekonomi, pemerintah juga mendukung sektor-sektor strategis lokal seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif, yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Melalui bantuan finansial dan insentif, pemerintah mendorong diversifikasi ekonomi yang dapat menciptakan kemandirian di sektor lokal. Pengawasan dan akuntabilitas juga merupakan elemen penting dalam pengelolaan APBN. Melalui lembaga seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pemerintah melakukan audit dan evaluasi untuk memastikan dana publik digunakan dengan efektif dan efisien. Dengan mekanisme pengawasan yang ketat, pemerintah dapat meminimalkan penyimpangan dan memastikan bahwa setiap alokasi anggaran benar-benar fokus pada kesejahteraan rakyat dan

ANALISIS PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN APBN UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, pengelolaan APBN yang baik diharapkan dapat memperkuat kemandirian ekonomi di setiap daerah, mengurangi ketimpangan antar-daerah, dan memperkuat struktur perekonomian nasional yang lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Aqilah, A. S. (2024). Analisis Kebijakan Peran Pemerintah Dalam Membentuk APBN dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6.
- Dr.Aan Jaelani, M. (2012). Pengelolaan APBN Dan Politik Anggaran Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam. 1.
- Epi Purwanti, F. I. (2020). APBN, Kebijakan Fiskal Dan Utang Luar Negeri . p. 2.
- Febrina Olifia, H. N. (2023, Desember). Peran dan Kedudukan Zakat Terhadap Perekonomian Indonesia. p. 3.
- Maulida, & Afrizal. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*.
- Putri Rahayu Setiani, S. A. (2023). INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) SEBAGAI INDIKATOR PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH.
- Sazali, M. (2020). Implementasi Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Journal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*.
- Yolinda Aprillia, & Usman, F. (2023). Pengaruh Peran Pengawasan Atas Akuntabilitas Keuangan Atas Pengawasan Kualitas Pengendalian Intern Terhadap Tata Pengelolaan Pemerintah Daerah. 411.